

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN POTENSI DESA
OLEH PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA KARANGPAWITAN
KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN**

RIMA LISYANI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan potensi desa yang dilakukan pemerintahan desa, belum memadainya anggaran pemerintah desa untuk mendukung dan menjembatani masyarakat untuk berwirausaha dan belum memadainya kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?, 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?, 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa Karangpawitan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan sesuai empat hal efektivitas sebagai orientasi kerja, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa, belum memadainya sarana yang dimiliki, belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa, rendahnya motivasi perangkat desa, belum dimilikinya data-data terkait masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu mengikutsertakan perangkat desa pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia, memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan mengenai langkah-langkah untuk pengidentifikasian potensi-potensi desa.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pengelolaan Potensi Desa, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma sistem Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional.

Otonomi desa merupakan momentum penting untuk melakukan penataan secara menyeluruh terhadap pemerintahan desa. Semangat desentralisasi yang sinergis dengan penguatan masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan berbasis potensi lokal memberikan pemahaman bahwa harus segera dilakukan langkah-langkah yang lebih jelas guna menangani persoalan masyarakat. Di mana desa yang merupakan salah satu punggung perekonomian nasional yang menyimpan potensi besar dengan sumber alam yang mendukung, lahan kosong yang tersedia luas dan alam pedesaan yang masih bersih tetapi memiliki kesempatan yang terbatas dan dukungan dana yang masih minim dari

pemerintah pusat/daerah membuat potensi desa tersebut terpendam begitu saja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa:

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 108 bahwa:

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Dengan demikian lahirnya undang-undang dan peraturan tersebut adalah untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di desa, bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai

kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memiliki potensi baik potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia, serta potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah desa perlu melakukan pengelolaan seluruh potensi yang dimiliki desa.

Namun demikian kedudukan desa selama ini cenderung hanyalah sebagai obyek dari berbagai pihak untuk melaksanakan agendanya masing – masing. Bahkan terkesan kedudukan desa dipandang dalam perspektif fisik yaitu sebagai kantor pemerintah desa yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dan tugas administrasi. Relatif sedikit melihat atau menempatkan desa sebagai miniatur Negara, di mana terdapat hubungan yang dinamis antara rakyat dan pemerintah serta pasar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Simplifikasi kedudukan desa tersebut merupakan faktor dari terbatasnya perhatian dan alokasi sumberdaya yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan. Kendati secara kuantitatif, cukup banyak aktivitas proyek pembangunan, namun belum signifikan menjawab persoalan kemiskinan, pengembangan aset masyarakat. Bahkan sebaliknya sumberdaya desa telah dieksploitasi

bagi kepentingan pihak luar. Misalnya dalam kasus pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan. Di samping rendahnya inovasi atau bahkan ketidaksesuaian jenis proyek dengan kebutuhan masyarakat, juga disebabkan faktor terbatasnya sumberdaya terdidik yang mendedikasikan diri pada desa.

Menurut Darmawan, (2004:87) menyatakan bahwa:

Pengelolaan potensi desa merupakan salah satu ciri pemberdayaan (*empowering*), diantaranya: (1) prakarsa desa, (2) pemecahan masalah, (3) proses desain program dan teknologi bersifat asli/alamiah, (4) sumber utama adalah rakyat dan sumber daya lokal, (5) organisasi pendukung dibina dari bawah, (6) pembinaan personil berkesinambungan, berdasarkan pengalaman lapangan belajar dari kegiatan lapangan dan (7) fokus manajemen adalah kelangsungan dan berfungsinya sistem kelembagaan.

Oleh karena itu pemerintah desa perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan desa yang dimilikinya, baik saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah desa perlu melakukan pengelolaan seluruh potensi sumber daya yang ada di desa sehingga akan diperoleh gambaran potensi dan perkembangan desa yang akurat, komprehensif dan integral sehingga

potensi yang dimiliki desa akan dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Langkah tepat bagi Desa dalam pengelolaan daerahnya terlebih dahulu mampu menata kesamaan visi dan prinsip internal pemerintah Desa, karena tidak mungkin suatu langkah usaha didasari atas perbedaan visi dan prinsip. Pemerintahan Desa mengendalikan secara manajerial dan monitoring. Untuk bisa mewujudkan semua ini maka pemerintahan desa bersama-sama dengan segenap lembaga dan tokoh masyarakat perlu mengenali potensi apa saja yang ada baik fisik maupun non-fisik dan memahami bagaimana strategi dan cara mengembangkan potensi tersebut agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pengembangan potensi desa harus disesuaikan dengan permasalahan kehidupan atau kebutuhan masyarakat agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan secara luas sesuai tujuan yang telah disepakati bersama.

Kondisi potensi desa yang belum terkelola dengan baik ditunjukkan dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat di desa. Disamping itu pula tingkat pendidikan masyarakat tergolong masih rendah khusus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada munculnya permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Mata pencahariannyapun menjadi masalah

yang krusial bagi masyarakat yang bergantung pada kondisi alam yang terjadi.

Desa Karangpawitan terletak di Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang memiliki luas wilayah sekitar 669,67 Ha dengan 5 Dusun, 13 RW dan 41 RT. Jumlah penduduk Desa Karangpawitan 7.098 jiwa terdiri dari 3.623 laki-laki dan 3.475 perempuan sedangkan jumlah kepala keluarga 2.355 KK. Penduduk yang paling banyak di Desa Karangpawitan berada pada usia produktif (15-64 tahun) sebesar 4.807 jiwa (67,72%), penduduk usia bukan produktif golongan 0-14 tahun sebesar 1.805 (25,43%), dan golongan bukan produktif usia > 65 tahun 486 jiwa (6,85%). Kepadatan penduduk Desa Karangpawitan adalah 1.073/km² dan desa ini dikategorikan padat penduduk dan rata-rata per orang hanya memiliki 0.09 hektar.

Potensi terbesar dari Desa Karangpawitan adalah hasil pertaniannya, terutama beras. Hampir sebagian besar wilayah tersebut dimanfaatkan untuk ladang persawahan. Dapat dilihat dari hamparan sawah yang begitu luas membentang di daerah ini. Selain pertanian, banyak masyarakat Desa Karangpawitan yang bergerak di bidang industri, terutama perikanan dan industri rumah tangga. Lahan perikanan merupakan intensifikasi lahan, sehingga warga Desa Karangpawitan tidak terlalu bergantung dengan hasil pertaniannya. Hasil

industri rumah tangga berupa panganan dari pisang dan pembuatan material bangunan.

Di bidang kesehatan, fasilitas yang sudah tersedia adalah Puskesmas. Selain itu, terdapat juga Puskesmas. Selain itu juga ada paguyuban kesehatan yang dinamakan Paguyuban Sehat Siaga. Desa Karangpawitan mempunyai sarana pendidikan yang bisa dikategorikan cukup karena memiliki empat TK, enam SD, dua SMP, SMA terpadu, serta PKBM (Paket B dan Paket C). Tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah karena sekitar 35% penduduknya hanya tamat sekolah dasar. Untuk aparat Desa Karangpawitan berusaha menekan nilai *droup out* pendidikan dan menggalakkan program wajib belajar Sembilan tahun.

Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai buruh tani. Selain buruh tani, ada juga masyarakat yang menjadi pedagang, pertukangan bahkan wiraswasta dalam bidang pembuatan cor dan batako. Namun, tidak sedikit pula masyarakat disini yang menjadi PNS, seperti guru ataupun pegawai di pemerintahan.

Desa Karangpawitan yang memiliki begitu banyak potensi, baik potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam namun belum terkelola dengan baik sehingga berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat seperti pendapatan masyarakat rendah, tingkat pendidikan masyarakat tergolong

masih rendah khusus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dan munculnya permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan permasalahan-permasalahan terkait potensi-potensi yang belum dikelola secara efektif oleh pemerintah Desa Karangpawitan, pemerintah, hal ini terlihat dari indikator-indikator diantaranya:

1. Belum efektifnya pelaksanaan pengelolaan potensi desa yang dilakukan pemerintahan desa dalam menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa sehingga sasaran yang hendak dicapai yaitu masyarakat sejahtera belum terwujud sesuai visi dan misi desa. Contoh, di Dusun Sindangratu masih banyaknya masyarakat yang kehidupannya kurang layak atau miskin, banyaknya usia produktif yang masih pengangguran dan sulitnya lapangan pekerjaan padahal di dusun tersebut merupakan daerah potensial karena merupakan daerah pertanian dan dekat dengan sungai Citanduy.
2. Belum memadainya anggaran pemerintah desa untuk mendukung dan menjembatani masyarakat untuk berwirausaha dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa. Contoh, di Dusun Patinggen I masih banyak para wirausaha UMKM seperti pedagang, pertukangan, pembuatan cor dan batako yang belum bisa mengembangkan usahanya karena

hanya mengandalkan modal seadanya tanpa adanya dukungan modal usaha.

3. Belum memadainya kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa sehingga pemerintahan desa belum dapat bekerja secara produktif dalam mencari dan menciptakan inovasi-inovasi untuk mengolah sumber daya yang dimiliki desa. Contoh, tingkat berpendidikan aparatur pemerintah desa sebagian memiliki latar belakang pendidikan SMA sehingga masih kurang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menciptakan inovasi-inovasi untuk mengolah sumber daya yang dimiliki desa

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?, 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa

Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran?.

B. LANDASAN TEORI

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Mahmudi, (2005:92) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”

Selanjutnya Moenir, (2006:166) menyatakan:

Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done. (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan)

Zahnd, (2006:200) mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: “Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan

biaya”. Sedangkan menurut Kurniawan, (2005:109): “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi- definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Menurut Suwardi, (2007:107) bahwa:

Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan management dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa

Indonesia menjadi manajemen. Manajemen pengelolaan diartikan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumberdaya terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang dilaksanakan.

Wardoyo (2010:41) memberikan definisi sebagai berikut: “Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa dalam skala aktivitas manajemen pengelolaan sebagai aktivitas mengatur, menertibkan dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu mengemukakan, menata, merapikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sesuai dengan prinsip-prinsip serta menjadikan hidup lebih selaras, serasi dengan yang lainnya.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Setiap desa sudah pasti memiliki banyak potensi didalamnya. Potensi yang dimiliki oleh sebuah desa dapat

dijadikan sebagai kekuatan serta peluang untuk melaksanakan pembangunan desa menjadi lebih baik.

Desa merupakan suatu kawasan permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 9, bahwa:

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Potensi merupakan sesuatu hal yang dapat di jadikan sebagai bahan atau sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita dalam hal ini di wilayah pedesaan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang efektivitas pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa Karangpawitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam

penelitian ini data primer diperoleh langsung dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa Karangpawitan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti

Adapun sumber data yang dipakai oleh peneliti untuk melengkapi data tersebut adalah informan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*literature study*), studi lapangan (observasi dan wawancara). Langkah-langkah analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (*data display*) dan Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifikasi*).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan sesuai empat hal efektivitas sebagai orientasi kerja, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan dimensi-dimensi efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Desa Karangpawitan masih terbilang kurang memadai, hal ini ditunjukkan dengan adanya sebagian besar aparatur desa yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA, selain itu masih adanya beberapa pekerjaan yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan seperti pelayanan pembuatan surat keterangan dan kurangnya tepatnya pemberian solusi pada masyarakat yang tertimpa masalah.

Di Desa Karangpawitan Pemerintah desa telah memiliki prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan, namun demikian dapat dikatakan masih kurang memadai. Penyediaan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah desa tersebut misalnya saja kepemilikan ruangan serbaguna yang digunakan untuk kegiatan rapat-rapat mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimilikinya sebidang tanah untuk keperluan bidang pertanian dan perikanan.

Siagian (2007:24) menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan”

Siagian (2005:171) menyatakan bahwa:

Apabila seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula.

Dengan demikian bahwa sumber daya, dana, sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaan potensi desa dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai.

2. Jumlah dan mutu barang dan jasa

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah desa telah memiliki target pelaksanaan pengelolaan potensi

desa, misalnya untuk pelaksanaan pengelolaan potensi desa dalam satu tahun ditetapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran sebanyak 50 orang, tingkat kesejahteraan meningkat selama 1 tahun sebesar 10%.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai tujuan dan sasarannya seperti untuk memanfaatkan lahan tidak produktif setelah dilakukan identifikasi peluang ekonominya sehingga diputuskan untuk dibangun saluran irigasi sehingga lahan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sedarmayanti (2009:73) menyatakan tentang ukuran efektivitas terdiri dari tiga dimensi yaitu:

1. Kualitas: Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh persyaratan, spesifikasi, dan harapan telah dipenuhi.
2. Kuantitas: Kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa banyak tugas yang telah dipenuhi.
3. Waktu: Waktu merupakan suatu ukuran waktu yang diberikan sebagai patokan dalam menyelesaikan tugas.

Dengan demikian untuk mencapai efektivitas dalam pengelolaan potensi desa terkait jumlah dan mutu barang dan jasa akan dapat optimal bila memperhatikan kualitas pekerjaan yang dihasilkan, kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dan waktu pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

3. Batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karangpawitan, pemerintah desa dalam memahami strategi dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa masih kurang dipahami oleh seluruh aparatur desa sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan potensi desa belum tercapai dengan optimal. Pemerintah desa Karangpawitan dalam menyusun sebuah rencana untuk melaksanakan pengelolaan potensi yang terdapat di desa masih kurang dilakukan secara cepat tanggap.

Selanjutnya dalam memanfaatkan waktu untuk secara cepat dan efisien masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya para pelaku UMKM yang belum mengalami kemajuan dalam usahanya, modal usaha yang digunakan masyarakat masih belum meningkat.

Dengan demikian bahwa suatu pelaksanaan pekerjaan akan efektif bila dilakukan dengan adanya penentuan batas waktu untuk menghasilkan barang dan jasa, oleh karena itu dalam pelaksanaan pengelolaan penentuan target. Menurut Siagian (2005 :19) bahwa:

Efektivitas berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artinya apabila pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung pada bilamana tugas tersebut diselesaikan dan bukan terutama menjawab tentang bagaimana melaksanakan

serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa untuk mencapai pelaksanaan pengelolaan potensi yang maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu keseimbangan tujuan alat dan tenaga serta waktu.

4. Tata cara yang harus ditempuh

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Karangpawitan masih belum dapat memiliki data yang akurat mengenai berbagai macam potensi-potensi yang dimiliki Desa Karangpawitan secara keseluruhan. Selanjutnya pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan potensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya telah terdapat kebijakan untuk program kegiatan tersebut. Pemerintah Desa Kawangpawitan selama ini dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan terhadap berbagai potensi desa masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah desa.

Tangkilisan (2005:145) mengemukakan bahwa:

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektifitas dengan berbagai cara. Mengenai struktur ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi

pengambilan keputusan, dan formalisasi.

Dengan demikian bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa dapat mencapai tujuan dan sasaran harus dilakukan dengan produktivitas kerja yang tinggi melalui pelaksanaan berbagai tata cara yang ditempuh.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

1. Belum memadainya kemampuan sumber daya manusia yang memadai Pemerintah desa memiliki karena perangkat desa masih memiliki latar belakang pendidikan SLTA selain itu karena anggaran yang minim sehingga untuk meningkatkan SDM menjadi sulit
2. Belum memadainya anggaran yang memadai yang dimiliki pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatannya karena minimnya ketersediaan anggaran, pemerintah desa kesulitan untuk mencari sumber dana tambahan
3. Belum memadainya sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan potensi desa yang dimiliki pemerintah desa karena anggaran masih terbatas, kesulitan untuk menyediakan sarana pendukungnya
4. Belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan

karena keterbatasan anggaran, belum adanya kerjasama yang dilakukan pemerintah desa dengan pihak-pihak lain

5. Belum optimalnya Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas untuk mencapai sasaran yang terarah dan tujuan karena masih kurang memadainya sumber daya manusia perangkat desa sebagai pengelola potensi desa, masih rendahnya motivasi perangkat desa akan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan potensi desa
6. Kurangnya kejelasan strategi pemerintah desa sesuai dengan yang telah direncanakan karena kondisi sumber daya manusia pelaksana yang belum memadai, belum dimilikinya data-data terkait masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih rendah
7. Kurang dipahaminya strategi oleh seluruh elemen pemerintah desa dalam pengelolaan potensi desa karena kemampuan perangkat desa untuk memahaminya dan pemberian penjelasan strategi tersebut masih kurang
8. Belum optimalnya Pemerintah desa dalam mengidentifikasi seluruh potensi desa untuk dikembangkan dan dimanfaatkan karena kemampuan sumber daya perangkat desa yang belum memadai dan rendahnya komitmen perangkat desa untuk dapat mengelola potensi desa

Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang

dihadapi pemerintah desa berupa rendahnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa, belum memadainya sarana yang dimiliki, belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa, rendahnya motivasi perangkat desa, belum dimilikinya data-data terkait masyarakat, pemberian penjelasan strategi tersebut masih kurang dan rendahnya komitmen perangkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:

1. Mengikutsertakan perangkat desa pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia seperti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di tingkat kabupaten, kegiatan seminar dan bimtek pengelolaan potensi desa dan dilakukannya perekrutan melalui kegiatan seleksi
2. Mengajukan proposal permohonan sejumlah anggaran dan upaya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti swasta dan bank
3. Melengkapi sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan potensi desa dengan pengajuan tambahan anggaran untuk membeli sarana pendukung dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak

seperti pengusaha besar dan perbankan

4. Menambah sejumlah prasarana pemerintah desa sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dengan mengajukan proposal kepada pemerintah daerah dan melakukan negosiasi dengan pihak swasta dan pihak perbankan untuk membantu menyediakan prasarana
5. Mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan tersebut. Selain itu upaya meningkatkan kemampuan perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan
6. Melakukan pendataan kembali untuk melengkapi data-data kondisi masyarakat seperti jumlah pelaku usaha, jenis usahanya dan jumlah pendapatannya. Selain itu terkait data-data potensi yang dapat digali dan dikembangkan belum semuanya dimiliki oleh pemerintahn desa
7. Memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan secara menyeluruh agar pemahaman pelaksana strategi dapat meningkat dengan melakukan rapat-rapat di aula kantor desa sebulan sekali untuk membahas pelaksanaan pengelolaan potensi-potensi desa
8. Meningkatkan kemampuan SDM perangkat desa dengan memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai langkah-langkah untuk pengidentifikasian potensi-potensi desa serta mengalokasikan sejumlah biaya untuk kegiatan

operasional untuk melakukan pendataan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah desa berupa mengikutsertakan perangkat desa pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia, mengajukan proposal permohonan sejumlah anggaran dan upaya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti swasta dan bank, melengkapi sarana, menambah sejumlah prasarana dan melakukan pendataan kembali, memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan mengenai langkah-langkah untuk pengidentifikasian potensi-potensi desa.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran secara umum telah dilaksanakan sesuai empat hal efektivitas sebagai orientasi kerja, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum optimal, diantaranya belum dimilikinya sumber daya manusia yang memadai, minimnya memiliki sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan potensi desa, belum

jelasan strategi pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, kurangnya pemahaman tentang strategi dan belum optimalnya tindakan evaluasi.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu rendahnya kemampuan sumber daya manusia perangkat desa, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa, belum memadainya sarana yang dimiliki, belum memadainya prasarana yang dimiliki pemerintah desa, rendahnya motivasi perangkat desa, belum dimilikinya data-data terkait masyarakat, pemberian penjelasan strategi tersebut masih kurang dan rendahnya komitmen perangkat desa.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas pengelolaan potensi desa oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yaitu mengikutsertakan perangkat desa pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia, mengajukan proposal permohonan sejumlah anggaran dan upaya melakukan kerjasama dengan pihak lain seperti swasta dan bank, melengkapi sarana, menambah sejumlah

prasarana dan melakukan pendataan kembali, memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan mengenai langkah-langkah untuk pengidentifikasian potensi-potensi desa.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Karangpawitan sebaiknya dalam pelaksanaan pengelolaan potensi desa lebih memfokuskan pada ketersediaan sumber daya manusia, sarana untuk mencapai tujuan pengelolaan potensi desa, strategi pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, pemahaman tentang strategi dan tindakan evaluasi sehingga pengelolaan potensi desa akan lebih efektif dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa, maka sebaiknya Pemerintah Desa Karangpawitan dapat mengikutsertakan perangkat desa pada kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan workshop, melakukan kerjasama dengan pihak perbankan ataupun swasta dan melengkapi sarana dan prasarana sehingga pelaksanaan pengelolaan potensi desa di dukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai.
3. Sebaiknya Pemerintah Desa Karangpawitan lebih berupaya dalam mengatasi hambatan-

hambatan dengan cara lebih berfokus pada peningkatan kemampuan dan keterampilan perangkat desa, menjalin kerjasama dan kemitraan, menambah ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pengelolaan potensi desa dan menambah sejumlah anggaran untuk membiayai sejumlah kegiatan pengelolaan potensi-potensi desa dalam proses pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif yang akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Darmawan, Didit. 2004. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Kurniawan, Agung. 2006. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP. YKPN.
- Moenir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi. Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Suwardi, 2007. *Manajemen Pembelajaran*, Salatiga: STAIN Salatiga Press.

Tangkilisan, 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Wardoyo, S.T.H. 2010. *Pengelolaan Kualitas Air*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Zahnd, Markus. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.